

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa pada umumnya merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan perekonomian Desa demi kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sebagai dasar untuk pembangunan berikutnya. Dengan melihat potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah, perlu perencanaan pembangunan agar dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa yang lebih maju dalam hal Kesehatan, Pendidikan, kesempatan kerja, serta meningkatkan kesadaran kepada masyarakat Desa akan pentingnya pembangunan berkelanjutan (Lukmawati et al., 2020).

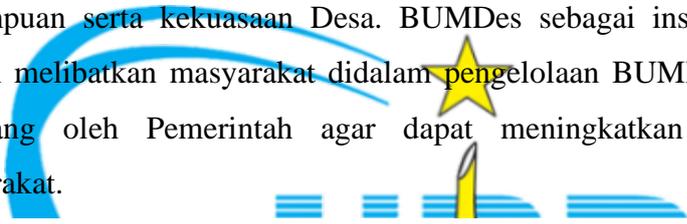
Menurut UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dalam jurnal (Desiwantara et al., 2021) menjelaskan yang dimaksud pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan dari pembangunan Desa adalah memajukan perekonomian masyarakat Desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan nasional. Otonomi Desa dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada Desa untuk mengatur pembagian dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa. Salah satu usaha Desa untuk memperoleh dana sendiri yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang pelayanan umum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. BUMDes dapat membangun berbagai macam usaha, mulai dari bidang pelayanan jasa, perdagangan, keuangan, serta pengembangan ekonomi yang lain. BUMDes memiliki cara kerja dengan menerima semua kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi sebuah bentuk kelembagaan serta badan usaha yang dapat dikelola secara berpengalaman berdasarkan potensi yang dimiliki Desa dengan kemampuan serta kewenangan yang dimiliki Desa.

Dalam pasal 2 dan 3 Permendes nomor 4 tahun 2015 BUMDes yang bertujuan agar dapat meningkatkan perekonomian Desa, meningkatkan aset Desa agar dapat bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam

pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan perencanaan kerjasama usaha antar Desa atau pihak ketiga, menciptakan peluang serta jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan serta pemerataan Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan asli Desa (Bone, 2022).

Pemerintah Desa mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dengan harapan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan Desa. BUMDes sebagai instrumen otonomi Desa yang bermaksud untuk pengembangan potensi Desa yang didukung Pemerintah Desa, sesuai kemampuan serta kekuasaan Desa. BUMDes sebagai instrumen kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes dan agenda yang dirancang oleh Pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.



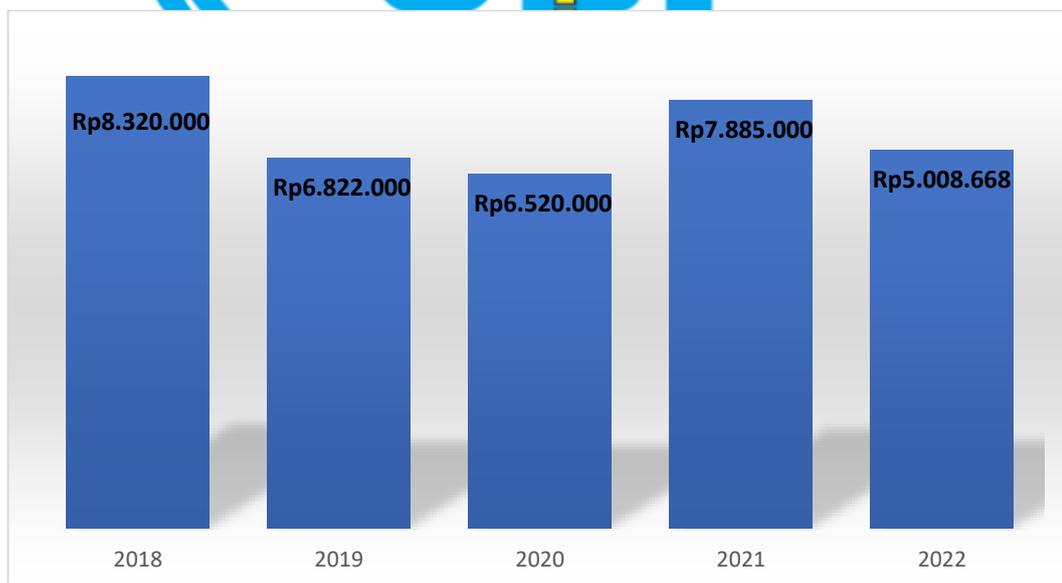
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan Negara dapat dilaporkan secara andal, aset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI dalam penerapannya harus senantiasa memperhatikan norma keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. (Pitaloka, et al., 2020).

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Internal perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan pengukuran efektivitas pengukuran, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di

berbagai negara, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Perekonomian di Desa XYZ Kecamatan Telukjambe Barat berasal dari sektor pertanian dan industri UMKM Karena letaknya strategis berdekatan dengan Kawasan Industri yang berada di Kabupaten Karawang. Walaupun Perekonomian Desa XYZ Berasal dari pertanian dan UMKM, Kebanyakan warga di Desa XYZ juga bekerja sebagai buruh, karena lokasinya berdekatan dengan Kawasan industri. BUMDes di Desa XYZ Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang mengelola jenis usaha sarung tangan dan majun yang dikelola dari tahun 2018 sampai saat ini, tetapi BUMDes XYZ tidak mengelola sendiri, melainkan bekerjasama dengan UMKM sebagai produsen dari sarung tangan dan majun tersebut.

Gambar 1.1
Pendapatan BUMDes XYZ Tahun 2018-2022



Sumber: Data BUMDes Desa XYZ (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan pada usaha BUMDes dari tahun 2018 sampai 2022 cenderung mengalami penurunan, disebabkan biaya operasional yang tinggi. Hal ini adalah akibat dari sistem

pengendalian internal BUMDes yang kurang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, ditemukan beberapa fenomena diantaranya adalah:

1. BUMDes XYZ belum memiliki kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik dalam bidang akuntansi, terlihat pada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Tidak ada pemisahan tugas walaupun terdapat struktur organisasi.
3. Tidak ada praktik yang sehat dalam kegiatan bisnis, terlihat dari biaya yang lebih besar dari pada pendapatan.
4. Tidak dilakukan kegiatan *monitoring* secara berkala sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan sering mengalami kerugian.
5. Kegiatan *evaluasi* dilakukan namun, tidak disertai kegiatan *monitoring* yang rutin.

Hasil penelitian terdahulu oleh (Achmad et al., 2022) menyimpulkan bahwa BUMDes Bantal telah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai konsep komponen COSO. Hal ini dibuktikan dari adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar pengurus BUMDes, adanya otorisasi dari setiap aktifitas bisnis, serta dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik. Kelemahan yang masih dijumpai yaitu belum adanya dokumen standar operasional prosedur dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2021) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit pada BUMDes Bina Usaha Desa Aman Damai kurang efektif dan terlalu sederhana dikarenakan pembagian wewenang dan tugas terkait pemberkasan data kreditur, surveyor, analis, bendahara yang masih tumpang tindih. Hal ini disebabkan kurangnya pengendalian intern dan tidak adanya pemeriksaan khusus terkait penyaluran kredit pada BUMDes Bina Usaha Desa Aman Damai.

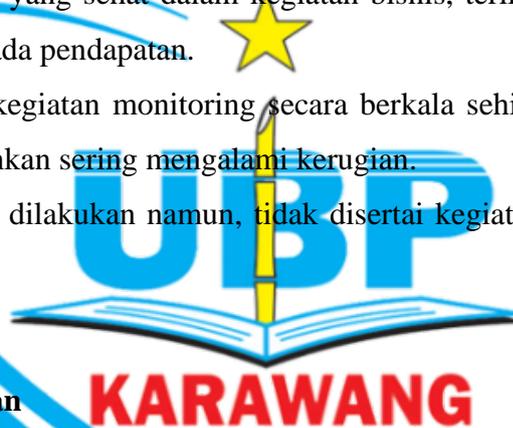
Penelitian ini penting untuk dilakukan karena banyak Badan Usaha Milik Desa hanya sekedar dibentuk saja. Namun, dalam operasionalnya kurang optimal dan bahkan tidak terealisasi. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan saran agar dapat mengoptimalkan kinerja BUMDes sebagai bagian dari pendapatan asli Desa. Maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini

yang berjudul “**Analisis Pengendalian Internal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa XYZ Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. BUMDes XYZ, belum memiliki kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik dalam bidang akuntansi, terlihat pada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Tidak ada pemisahan tugas walaupun terdapat struktur organisasi.
3. Tidak ada praktik yang sehat dalam kegiatan bisnis, terlihat dari biaya yang lebih besar dari pada pendapatan.
4. Tidak dilakukan kegiatan monitoring secara berkala sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan sering mengalami kerugian.
5. Kegiatan evaluasi dilakukan namun, tidak disertai kegiatan monitoring yang rutin.



1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dengan menyesuaikan permasalahan yang ditemukan dilapangan batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini menganalisis pengendalian internal pada BUMDes di Desa XYZ Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang.
2. Penelitian ini dilakukan dalam rentan waktu selama 6 bulan.
3. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan pokok permasalahannya yaitu bagaimana analisis pengendalian internal pada Badan Usaha Milik Desa di Desa XYZ Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan secara umum mengenai tujuan penelitian yang dapat menunjukkan hasil yang diharapkan. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk menguji dan menganalisis pengendalian internal pada Badan Usaha Milik Desa di Desa XYZ Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam menambah khasanah keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan akuntansi dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan sekaligus mampu memberikan stimulus untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik yang terkait sehingga studi akuntansi selalu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat tentang analisis pengendalian internal pada BUMDes di Desa XYZ Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang.
- c. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi BUMDes Desa XYZ dalam melakukan pengendalian internal yang tepat untuk pengelolaan BUMDes agar dapat meningkatkan kinerja BUMDes di Desa.